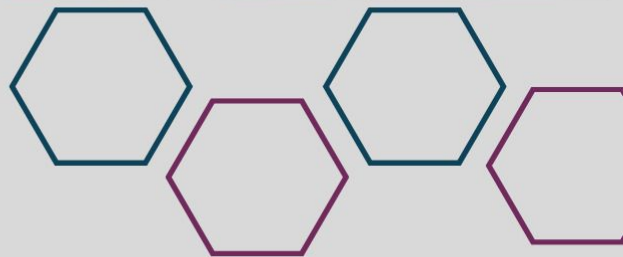
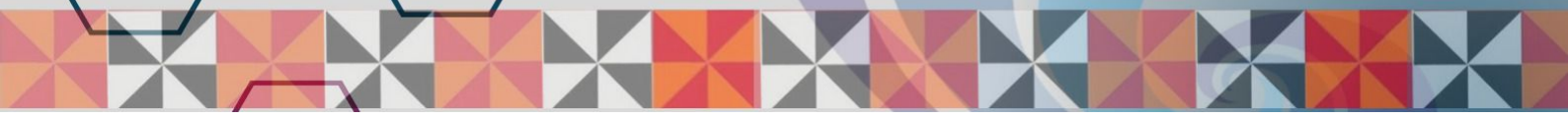




**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



RENJA PERUBAHAN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan mengalami perubahan baik dari anggaran maupun target yang ditetapkan. Maka untuk itu disusunlah Renja Perubahan OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;

- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN,**
Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.
- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II,**
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
- **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
- **BAB IV PENUTUP**
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- **LAMPIRAN**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai Triwulan II memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada lampiran I.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 11 kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk subkegiatan rutin 38 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk belanja sebesar Rp.6.930.401.083,- terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.470.376.609,- atau 50,07 persen.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 34 Sub Kegiatan yang realisasi Fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 51,32 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 53,74 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 71,57 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi Fisik/Output sebesar 40,01 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
11. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
12. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
13. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
14. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi Fisik/Output sebesar 40,83 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya

15. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Realisasi Fisik/Output sebesar 25 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
16. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Realisasi Fisik/Output sebesar 25,51 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
17. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 28,57 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi Fisik/Output sebesar 6,90 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi Fisik/Output sebesar 25,83 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi Fisik/Output sebesar 44,90 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Realisasi Fisik/Output sebesar 46,47 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
22. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi Fisik/Output sebesar 14,24 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
23. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Realisasi Fisik/Output sebesar 33,13 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
24. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Realisasi Fisik/Output sebesar 48,71 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya

25. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media Realisasi Fisik/Output sebesar 70,86 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
26. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Realisasi Fisik/Output sebesar 40,62 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
27. Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik/Output sebesar 54,37 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
28. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Realisasi Fisik/Output sebesar 21,40 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
29. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 48,22 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
30. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Realisasi Fisik/Output sebesar 11,85 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
31. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
32. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik/Output sebesar 40,67 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya
33. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Realisasi Fisik/Output sebesar 7,43 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya

34. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik/Output sebesar 41,07 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dirinci sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 9.424.650.265,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp. 7.017.259.925,-
3. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Pergeseran Tahun 2023 sebesar Rp.6.930.401.083,-
4. Jumlah Sub Kegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 9 Sub Kegiatan
5. Jumlah Sub Kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan
6. Jumlah Sub Kegiatan yang baru muncul pada renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 1 Sub Kegiatan
7. Jumlah Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan.

BAB IV

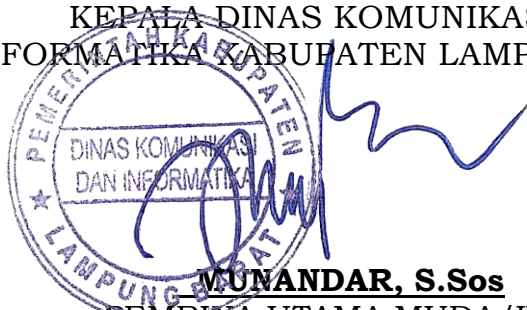
P E N U T U P

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Renja Perubahan ini merupakan sinkronisasi antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun sebelumnya dengan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Akhirnya, semoga Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajarannya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Lampung Barat Regency Office of Communication and Informatics. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT' around the perimeter and 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

MUNANDAR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 197007241996031003

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIVULAN II TAHUN 2023
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026		Target Kinerja DPA Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Trivulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Trivulan II Tahun 2023	
			4	5	6	7	Realisasi Target Capaian Target (%)			
							Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Target Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8/7/6	9/5/7	10/6/4	
2.16.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai saku OPD	81,13%		81,13%					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	Dokumen	25	Dokumen				
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	Dokumen	8	Dokumen	4	50%	4	13%
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	25%
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	25%
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	1	Laporan	0	0%	0	0%
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	12	Laporan	0	0%	0	0%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	16	Dokumen	4	Dokumen				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang/bulan	29	orang/bulan	29	100%	29	100%
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	0	0%	0	0%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	1	Laporan	0	0%	0	0%
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	4	Dokumen	1	Dokumen				
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.01.2.03.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di monitoring dan dievaluasi	29	orang	29	orang				
2.16.01.2.03.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan	24	Laporan	6	Laporan				
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	100%	1	25%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	3	Paket	3	100%	3	15%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	44	Paket	1	Paket	0	0%	0	0%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3	Dokumen	1	33%	1	8%
2.16.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Laporan	12	Laporan	3	20%	3	6%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	3	20%	3	6%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Laporan	4	Laporan				
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	Laporan	2	Laporan	0	0%	0	0%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	3	Laporan	1	33%	1	33%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	2	Laporan	1	50%	1	25%
2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Jenis	3	Jenis				
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pakaj dan Perincinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakaj dan Perincinannya	10	Unit	10	Unit	5	50%	5	50%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	22	Unit	0	0%	0	0%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan Perlatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan yang Dipelihara	2	Unit	2	Unit	0	0%	0	0%
2.16.03	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	Poin	60	Poin				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terakses	6	Jenis	6	Jenis				
2.16.02.2.01.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8	Dokumen	2	Dokumen	1	50%	1	13%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	15	Dokumen	12	Dokumen	10	83%	10	67%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	3	Dokumen	2	67%	2	17%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	300	Layanan	267	Layanan	267	89%	267	17%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kamitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kamitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi	15	Dokumen	12	Dokumen	10	83%	10	67%
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48	Unit	12	Unit	0	0%	0	0%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	60	%	30	%				
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Egovernment	8	Dokumen	2	Dokumen				
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	0	0%	0	0%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Data Statistik Sektoral yang Dimasukkan	100	%	28%					
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	2	Dokumen				
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	4	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	25%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	112	Orang	28	Orang	0	0%	0	0%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	presentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	100	%	100	%				
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	16	Laporan / Dokumen	4	Laporan / Dokumen				
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60	Laporan	15	Laporan	6	40%	6	10%

2	21	02	2.02	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24	Laporan	6	Laporan	0	0%	0	0%
2	21	02	2.02	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	PD	15	PD	6	40%	6	40%

No	Urut	Kode	Uraian	Unit Pelaksana	Indikator Kinerja	Volume	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070																																				
1	00	100	000	Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		140.330.000	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000	220.000.000	230.000.000	240.000.000	250.000.000	260.000.000	270.000.000	280.000.000	290.000.000	300.000.000	310.000.000	320.000.000	330.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000	370.000.000	380.000.000	390.000.000	400.000.000	410.000.000	420.000.000	430.000.000	440.000.000	450.000.000	460.000.000	470.000.000	480.000.000	490.000.000	500.000.000	510.000.000	520.000.000	530.000.000	540.000.000	550.000.000	560.000.000	570.000.000	580.000.000	590.000.000	600.000.000	610.000.000	620.000.000	630.000.000	640.000.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000	680.000.000	690.000.000	700.000.000	710.000.000	720.000.000	730.000.000	740.000.000	750.000.000	760.000.000	770.000.000	780.000.000	790.000.000	800.000.000	810.000.000	820.000.000	830.000.000	840.000.000	850.000.000	860.000.000	870.000.000	880.000.000	890.000.000	900.000.000	910.000.000	920.000.000	930.000.000	940.000.000	950.000.000	960.000.000	970.000.000	980.000.000	990.000.000	1000.000.000